# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Akuntansi publik merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan dalam suatu organisasi lembaga publik ataupun lembaga non publik yang berorentasi pada pelayanan, dimana dalam pengelolaan keuangan di sektor publik di tuntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan publik agar berjalan dengan baik untuk masyarakat (Mustari, 2020).

Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas, layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaa pelayanan. mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Menurut (Mardiasmo, 2018). Ekonomi merupakan perolehan pemasukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisisr sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Akuntansi sektor public berperan penting dalam menyiapkann laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. (Indra Bastian, 2001)

Perubahan perkembangan sektor publik ini dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan tanggung jawab publik dan adminisi dari pemerintah pusat, propinsi, dan daerah. Kemudian Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur Keseimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan dasar hukum untuk desentralisasi fiskal dan menjelaskan pembagian sumber pendapatan baru dan transfer antar pemerintah. Kurangnya profesionalisme petugas pelayanan publik di indonesia pada organisasi layanan publik membuat kita sadar akan perlunya perhatian khusus untuk melakukan tugas secara langsung dalam layanan publik sehingga masyarakat memperoleh layanan yang baik dengan melakukan keseimbangan antara kekuasaan yang miliki dan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani (Bastian, 2006).

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran *(output)* yang maksimum dengan masukan tertentu dengan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (*output/input*) yang menurut standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan tingkat pencapaian program dengan target yang ditetapkan.

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah *(agen)* untuk memberikan jawaban, melaporkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemberi amanah (Mardiasmo, 2018). *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menurut (Auditya, 2013) berpendapat bahwa pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan transparansi dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik.

Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu saja dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan. Selama ini, sektor publik seringkali dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instansi sering merugi serta tuntutan masyarakat dalam hal

pengelolaan anggaran yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Seperti fenomena yang terjadi di Pemkot Bandar Lampung beberapa bulan lalu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan lampu kuning mengenai temuan indikasi kerugian negara pada 11 paket pekerjaan peningkatan jalan APBD tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK Lampung menemukan bahwa adanya indikasi kekurangan volume pada 11 pekerjaan tersebut dengan indikasi kerugian negara lebih kurangnya sekitar Rp 556,386 juta dari 11 paket pekerjaan dengan total kontrak mencapai sekitar Rp 11 miliar. Temuan kerugian negara yang sebesar itu mendapat sorotan Barisan Aliansi Lembaga Anti Korupsi (BALAK). Ketua Balak, Julianda, menegaskan bahwa setiap temuan BPK atas hasil pemeriksaan atau uji petik di lapangan atas suatu hasil pekerjaan proyek yang dibiayai keuangan negara selalu terjadi. Julianda juga meminta pengembalian kerugian negara sesuai hasil pemeriksaan BPK segera dilaksanakan, dikarenakan jika tidak bisa pasti ada konsekuensi hukum atas temuan tersebut. Julianda juga mengungkapkan bahwa adanya pengakuan sejumlah rekanan yang sudah setor sejak sebelum pilkada dan baru mendapat pekerjaan di tahun 2021.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan instansi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga segala urusan pemerintahan dapat optimal. (Auditya, 2013) berpendapat bahwa pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan transparansi dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas, layanan, *responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas,* serta pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adanya konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitas pada pelayanan publik, Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen / rupiah (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Ekonomi berkaitan dengan

pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti penggunaan anggaran tersebut yang harus mencapai target – target yang bertujuan untuk kepentingan publik menurut (Angga dini, 2012).

Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*. Melalui informasi yang transparansi dan mudah di akses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisifasi secara nyata dalam proses – proses yang berkepentingan dengan publik Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang maksimal transparansi dan akuntabilitas serta *Value For Money* haruslah memaksimalkan implementasinya. Dengan mengembangkan akuntansi sektor publik diharapkan untuk membantu pemerintah untuk membangun dan menggunakan pengelolaan keuangan sektor publik dan kinerja untuk tata kelola yang baik dari aspek keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik dari aspek keuangan, kinerja pemerintah maupun pelayanan publik yang baik penilaian kinerja instansi pemerintah serta informasi yang komprehensip, yang tepat informasi ini digunakan untuk bahan pemgambilan keputusan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan sektor publik, diantaranya kejelasan perwujudan nilai transparansi, akuntabilitas, *value for money*, dan pengelolaan akuntansi keuangan publik.

Dalam suatu organisasi publik harus mewujudkan nilai–nilai transparansi, akuntabilitas karena dengan mengimplementasikan dalam sebuah organisasi publik agar tercipta kinerja pemerintahan suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat terwujudnya *good governance* dan agar tidak terjadi pemborosan dana publik sebaiknya konsep *value for money* diterapkan dalam organisasi sektor publik dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.

Penelitian sebelumnya seperti penelitian dengan hasil penelitian (Sayuti, 2018), berjudul Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep *Value for Money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Kantor Bappeda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja berkonsep *value for money*. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah adanya perbedaan pada tahun penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu tahun 2018 sedangkan peneliti terkini pada tahun 2022 dan perbedaan riset kota atau daerah penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilihat dari fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan "**PERWUJUDAN NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK (STUDI KASUS OPD DI BANDAR LAMPUNG)"**

## 1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Publik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang telah dikembangkan dari peneliti sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2022.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Perwujudan Nilai Transparansi terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Publik?
2. Apakah terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Publik?
3. Apakah terdapat pengaruh *Value For Money* terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Publik?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh Perwujudan Nilai Transparansi terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Publik di OPD Bandar Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Publik di OPD Bandar Lampung
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh *Value For Money* terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Publik di OPD Bandar Lampung

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menjadi suatu pertimbangan untuk mengembangkan ilmu akuntansi pemerintahan khususnya manfaat akademis berupa saran perkembangan ilmu dalam OPD di Bandar lampung pada umumnya, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Berikutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi informasi teoritis dalam melakukan penelitian serupa sehingga dapat membantu peneliti berikutnya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya di bidang sejenis atau di bidang lain yang terkait.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tata kelola pemerintahan yang baik dengan adanya nilai–nilai transparansi atau keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adanya pengukuran kinerja dengan konsep *Value For Money* serta memberikan manfaat bagi para pemakai laporan keuangan publik dan manajemen pemerintah agar berjalan dengan baik.

4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi informasi serta wawasan teoritis dalam memahami tentang pengelolaan akuntansi publik.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dan dibagi menjadi lima bab, uraiannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan fenomena dalam latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan teori-teori yang mendasari untuk mendukung penelitian/grand theory, uraian tentang Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Publik. Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait yang digunakan untuk memperkuat dasar analisis penelitian, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Hal-hal yang terangkum dalam bab ini antara lain : sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi variabel penelitian yang digunakan, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi deskripsi data, deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil dari pengolahan data dianalisis, dan dibahas setiap variabelnya, serta adanya hasil pengujian hipotesis beserta pembahasannya.

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini serta saran untuk peneliti selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**